Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-883

EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A)

Rokib[1], Shofiatul Jannah[2], Syamsu Madyan[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012059@unisma.ac.id, [2]shofia@unisma.ac.id,

Abstract

The high divorce rate within the jurisdiction of the Bangil Religious Court highlights the need for a dispute resolution mechanism that is fast, efficient, and oriented toward justice and reconciliation. Mediation serves as an alternative solution to settle conflicts amicably, either by reconciling couples or facilitating agreements on alimony, child custody, and division of marital assets. This study aims to evaluate the mediation process and its effectiveness in divorce case resolution at the Bangil Class 1-A Religious Court. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and case document analysis. The findings show that mediation is conducted in three stages: opening, core process, and closing. Although the rate of full reconciliation remains low, mediation is effective in reaching partial agreements, particularly concerning child custody, alimony, and shared property. Supporting factors include mediator competence, empathetic communication, and neutrality. Major obstacles involve the emotional state of the parties and limited understanding of mediation's purpose. In conclusion, mediation plays a strategic role in achieving peaceful and fair divorce settlements while helping reduce the court's caseload.

Keywords: *Effectiveness of Mediation, Divorce, Bangil Religious Court, Settlement of Islamic Family Law Cases*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum begitulah tersirat dalam undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah adanya jaminan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan secara independen, tanpa campur tangan dari kekuasaan lain, guna menjalankan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam negara hukum yang berlandaskan pada prinsip rule of law, lembaga peradilan memiliki peran sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan berfungsi sebagai pengontrol terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan hukum. Peran ini juga mencerminkan posisi peradilan sebagai tempat terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teori keberadaannya

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

sangat bergantung pada lembaga peradilan dalam menjaga prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan (Elvany, 2023).

Hukum dibuat untuk melindungi masyarakat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka melalui pelaksanaan yang tertib dan damai. Namun, pelanggaran hukum tetap bisa terjadi, dan ketika itu terjadi, hukum harus ditegakkan. Dalam negara hukum, sistem peradilan memiliki peran penting sebagai penopang utama dalam menjaga ketertiban sosial dan menangani pelanggaran hukum. Peradilan juga dianggap sebagai tempat akhir dalam menilai keadilan dan fakta suatu perkara, dengan harapan dapat menegakkan prinsip keadilan tersebut (Harahap, 2008). Meski demikian, sistem peradilan di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama terkait lambannya proses hukum dan kurangnya efektivitas. Proses penyelesaian perkara seringkali memakan waktu lama, mulai dari tahap awal hingga tahap pemeriksaan ulang. Padahal, masyarakat mengharapkan penyelesaian perkara yang cepat dan substansial, bukan sekadar formalitas.

Sebagai respons terhadap lemahnya efisiensi dan efektivitas sistem pengadilan, muncul alternatif penyelesaian perkara melalui jalur damai. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten memberikan dasar hukum yang mendukung penyelesaian perkara secara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR menyatakan bahwa apabila kedua pihak hadir di hari sidang yang ditentukan, maka ketua pengadilan negeri wajib berupaya mendamaikan mereka. Sementara itu, ayat (2) mengatur bahwa apabila perdamaian tercapai, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian. Akta yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhisyarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara (Dewi, 2024).

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ADR atau alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat yang ditempuh melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yaitu di luar pengadilan, dengan menggunakan metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian oleh pihak ahli. Mediasi sendiri merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama (Saragih dkk., 2020).

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang terbukti efektif dan memiliki beragam manfaat. Salah satu keunggulan utama mediasi adalah kemampuannya menyelesaikan sengketa dalam waktu yang relatif singkat, dengan biaya yang lebih hemat, serta tetap menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih. Selain itu, proses mediasi juga mampu

menghindarkan sengketa dari sorotan publik yang berlebihan mediasi tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi juga berdampak positif bagi sistem peradilan. Pertama, mediasi dapat mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan. Kedua, dengan berkurangnya jumlah perkara, pengawasan terhadap kemungkinan adanya keterlambatan atau manipulasi proses peradilan menjadi lebih mudah. Ketiga, sedikitnya perkara yang ditangani memungkinkan proses pemeriksaan di pengadilan berlangsung lebih cepat dan efisien, untuk mengatur proses mediasi dengan lebih terstruktur, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan ini memberikan ketentuan yang lebih menyeluruh, rinci, dan sistematis terkait pelaksanaan mediasi di pengadilan. Salah satunya diatur dalam Pasal 4, yang menjelaskan jenis- jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi(Napitupulu f., 2022)

Mediasi di pengadilan agama merupakan proses perdamaian yang dilakukan antara suami dan istri yang mengajukan cerai, baik itu cerai talak maupun gugat cerai. Dalam proses ini, pengadilan agama akan menunjuk seorang hakim mediator untuk membantu menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak.Mediasi sendiri adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna mencapai kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perma No. 1 Tahun 2016 merupakan pembaruan dari Perma No. 1 Tahun 2008. Dalam peraturan terbaru ini, diatur berbagai ketentuan baru dan ditegaskan bahwa para pihak yang bersengketa diwajibkan mengikuti proses mediasi terlebih dahulu. Jika hakim pemeriksa perkara tidak mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, maka keputusan pengadilan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk kembali melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma No. 1 Tahun 2016). (Anam, 2021) Berdasarkan poin-poin pembaruan dalam Perma No. 1 Tahun 2016:

Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 membawa sejumlah pembaruan penting dalam proses mediasi di pengadilan. Salah satu perubahan signifikan adalah pemangkasan jangka waktu mediasi, yang semula 40 hari menjadi hanya 30 hari kalender sejak dikeluarkannya penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Selain itu, Perma ini juga mewajibkan kehadiran langsung para pihak dalam proses mediasi, baik dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

kehadiran tidak langsung hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang sah, seperti masalah kesehatan (yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter), sedang berada di luar negeri, atau memiliki profesi yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan pekerjaan, yang juga harus disertai dengan surat keterangan resmi

(Afriana, 2017). Di samping itu, Perma ini menegaskan kembali pengertian mediasi sebagai proses negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator berperan membantu para pihak dalam mencari titik temu dan mencapai kesepakatan bersama, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1851 KUHPerdata yang menyatakan bahwa mediasi merupakan bentuk perdamaian yang dicapai melalui kesepakatan antara dua belah pihak guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara (Muzamzil dan Hermawan, 2023).

Dalam proses penyelesaian sengketa tidak hanya mediator yang berperan di pengadilan, peran hakim juga ikut andil. Hakim merupakan kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berpekara juga sejalan dengan ajaran islam agar menyeleseikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia diseleseikan dengan jalan perdamaian (ishlal) tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah dalam persidangan perkara percerain ketika siding di mulai, (Rahman, 2023).

Pengadilan agama Bangil yang mengupayakan dan memaksimalkan perselisihan atau pertikaian dalam rumah tangga di sslesseikan dengan damai. Tapi beberapa catatan meskipun tidak terlalu efektif sangat sedikit perkara dalam mediasi yang berakhiran damai. Sehingga kemudian dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat lebih efektif dan diatasi agar mediasi lebih efektif dalam mendamaikann pihak perkara perceraian di Agama Bangil.

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, maka peneliti ingin lebih jauh menelaah tentang bagaimana efektivitas proses mediasi dalam menangani perkara perceraian, khususnya dalam memberikan solusi yang adil dan berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam realitas sosial. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana proses mediasi dilakukan dalam menangani perkara perceraian serta menilai efektivitasnya secara nyata. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan berbagai pihak terkait, seperti hakim mediator, pasangan yang menjalani mediasi, serta staf pengadilan, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bangil (Elvany, 2023).

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bangil, yang dipilih karena memiliki volume perkara perceraian yang cukup tinggi serta menerapkan proses mediasi secara aktif. Di pengadilan ini tersedia ruang mediasi dan mediator bersertifikat yang berperan memfasilitasi upaya perdamaian antar pihak yang bersengketa. Selain itu, pengadilan ini juga menjadi lokasi strategis untuk mengamati secara langsung pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, serta mengumpulkan data dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut (Suardi, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan utama seperti mediator, hakim, dan staf pengadilan. Data sekunder berasal dari dokumen hukum, peraturan, buku, dan literatur akademik yang relevan. Sementara itu, data tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber referensi tambahan lainnya yang mendukung analisis konseptual (Suardi, 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses mediasi untuk memahami pola interaksi, teknik penyelesaian sengketa, serta respons para pihak yang berselisih (Elvany, 2023). Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun sebelumnya, dan dilakukan kepada hakim mediator serta pihak-pihak terkait guna memperoleh data yang relevan dan mendalam (Jazilatul Maghfiroh, 2023). Selain itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah arsip-arsip perkara yang berhasil maupun gagal diselesaikan melalui mediasi, serta dokumen-dokumen administratif lainnya yang menunjang keakuratan data (Rifki Adha, 2021).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dimulai dengan proses transkripsi wawancara, reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data secara naratif, hingga penarikan kesimpulan yang berangkat dari hasil temuan lapangan. Peneliti menggunakan metode analisis interaktif yang mencakup teknik experiencing (mengalami langsung), inquiring (menggali melalui pertanyaan), dan examining (menelaah dokumen dan data) untuk membangun pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap permasalahan yang dikaji (Dewi, 2024).

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun waktu. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai informan dan mengumpulkannya pada waktu yang berbeda agar diperoleh data yang lebih kuat, akurat, dan terpercaya. Teknik ini penting untuk menjaga kredibilitas dan validitas temuan, serta

memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Elvany, 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Fenomena perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade. Berdasarkan data dari Ditjen Badan Peradilan Agama, tren perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan lonjakan signifikan dalam lima tahun terakhir. Sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani perkara keluarga Islam, Pengadilan Agama menjadi saksi meningkatnya konflik rumah tangga yang berakhir pada perceraian Salah satu strategi untuk meredam peningkatan ini adalah melalui proses mediasi. Secara formal, mediasi merupakan tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara diputus dalam sidang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016. Dari sisi hukum Islam, mediasi sesuai dengan konsep ishlah, yaitu upaya perdamaian dalam rumah tangga yang didorong dalam ajaran syariat (Rani Damiati, 2025)

Dari Penelitan yang telah dilaksankan oleh peneliti dengan judul, "Efektivitas proses Mediasi dalam menangani perkara perceraian" (Studi Kasus Pengadilan Agama Bangil kelas 1-A). Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. maka peneliti memberikan pandangan penelitian terhadap temuan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber mengenai Efektivitas Proses mediasi dalam menangani perkara perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A) terdapat beberapa sebagai berikut:

Wawancara pada tanggal 26 juni 2025 dengan mediator nonhakim dengan Ibu Sevy Dian Faizzati M.HI.

1. Proses Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangil

Ibu Sevy dian menjelaskan bahwa "*Mediasi di Pengadilan Agama Bangil dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu pembukaan (awalan), inti mediasi, dan penutupan. Pada tahap pembukaan, mediator memperkenalkan diri kepada para pihak serta menjelaskan aturan main dalam ruang mediasi, seperti larangan saling menyela, tidak menggunakan kata-kata kasar, serta pentingnya menghormati proses yang berjalan. Tahap ini bertujuan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif dan membuka ruang kepercayaan antara para pihak dan mediator*".

Lalu, beliau menjelaskan bahwa:

"Tahap kedua adalah inti mediasi, di mana mediator mulai menggali permasalahan dari masing-masing pihak secara bergiliran. Pada tahap ini, mediator berusaha untuk memahami duduk persoalan secara objektif, mencari kemungkinan titik temu, dan menimbang siapa di antara para pihak yang lebih terbuka untuk

berdamai. Tahap terakhir adalah penutupan atau kesimpulan, yang berisi ringkasan hasil mediasi. Apabila tercapai kesepakatan, maka mediator akan menuangkannya dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak untuk dilaporkan kepada majelis hakim".

Disamping itu adanya prosedur hukum mediasi yang dimana ibu sevy diana selaku narasumber menjelaskan bahwasanya:

"Secara hukum, mediasi harus dihadiri langsung oleh pihak prinsipal (suami dan istri) dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum, kecuali terdapat surat kuasa khusus yang secara tegas menyebutkan bahwa kuasa tersebut diberikan untuk keperluan mediasi. Dalam praktiknya, apabila pihak tidak dapat hadir secara langsung karena alasan tertentu, maka mediasi tetap bisa dilakukan melalui media video call sebagai bentuk komunikasi langsung. Hal ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tetap terlibat aktif dalam proses mediasi, meskipun secara fisik tidak hadir di pengadilan".

Adapun tantangan dalam Proses Mediasi, yakni yang telah dialami oleh mediator yakni sebagai berikut:

Mediator mengatakan *bahwa "tantangan dalam pelaksanaan mediasi cukup kompleks. Salah satu yang paling dominan adalah emosi para pihak yang belum stabil, di mana sebagian besar datang ke ruang mediasi dengan penuh amarah atau rasa kecewa. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada pihak yang menangis hingga pingsan karena tidak siap menghadapi kenyataan perceraian. Di sisi lain, ketidaktahuan para pihak tentang hakikat mediasi juga menjadi kendala tersendiri, karena mereka sering menganggap mediasi sebagai proses pemaksaan untuk rujuk, padahal tujuannya adalah mencari solusi terbaik, baik itu rujuk maupun pisah secara baik-baik".*

Beberapa keberhasilan dan Indikator Mediasi:

"Keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari apakah para pihak rujuk kembali, melainkan juga dari apakah mereka dapat mencapai kesepakatan sebagian yang mempermudah proses persidangan. Ibu Sepinyan menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi untuk rujuk hanya sekitar 5–10%. Namun, tingkat keberhasilan sebagian, seperti kesepakatan dalam hal nafkah idah, mut'ah, dan hak asuh anak, cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian tetap terjadi, namun mediasi berperan penting dalam mendorong penyelesaian yang lebih damai dan terstruktur".

Adapun indikator keberhasilan mediasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Tidak berhasil – ketika tidak tercapai kesepakatan sama sekali,

Berhasil sebagian – ketika terdapat beberapa poin yang disepakati, seperti pembagian nafkah atau hak anak,

Berhasil total (damai) – ketika para pihak memutuskan untuk rujuk kembali.

Kategori "berhasil sebagian" menurut narasumber sudah dianggap sebagai bentuk keberhasilan yang signifikan karena sangat membantu proses persidangan menjadi lebih cepat dan efektif.

Peran dan Kompetensi Mediator:

Dalam menjalankan tugasnya, Ibu Sepinyan berkata *"beliau mengikuti pelatihan mediator selama dua minggu di UIN Malang. Pelatihan tersebut diadakan bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan menghasilkan sertifikat mediator yang diakui secara nasional. Menariknya, pelatihan ini tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan hukum, tetapi juga terbuka untuk semua lulusan sarjana S1 dari berbagai disiplin ilmu. Dalam ruang mediasi, mediator tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik komunikasi dan penyelesaian konflik, tetapi juga dituntut untuk memiliki keseimbangan emosi dan empati tinggi terhadap kondisi psikologis para pihak".*

Evaluasi dan Dampak Mediasi:

Beliau juga menambahkan *"bahwa laporan keberhasilan mediasi dikumpulkan secara berkala dan dilaporkan ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan. Meskipun jumlah perkara yang masuk ke tahap mediasi mengalami penurunan, tetapi tingkat keberhasilan – terutama dalam kategori kesepakatan sebagian – terus mengalami peningkatan. Hal ini juga didorong oleh kebijakan internal pengadilan yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam proses mediasi*".

Kesimpulannya, meskipun mediasi merupakan perintah dari Majelis Hakim dan bukan keinginan murni dari para pihak, banyak pihak yang setelah menjalani proses mediasi justru merasa lebih lega dan terbuka. Sebagian dari mereka bahkan melanjutkan percakapan setelah sesi resmi berakhir untuk menyampaikan unek-unek atau mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Hal ini menunjukkan bahwa ruang mediasi tidak hanya berfungsi secara legal formal, tetapi juga memberikan ruang psikologis dan emosional bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara manusiawi untuk menumukan jalan tengan atau solusi terbaik didalam mediasi.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Syafa'atin S.H selaku salah satu mediator di Pengadilan Agama Bangil. Beliau menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi mediator sejak akhir tahun 2018, sehingga hingga tahun 2025 ini telah memiliki pengalaman kurang lebih selama delapan tahun dalam menangani perkara mediasi di lingkungan peradilan agama. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan, tantangan, dan efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil berdasarkan pengalaman beliau secara langsung. Beliau mengatakan bahwa:

Dalam menjelaskan tahapan mediasi, Ibu Syafa'atin menyebutkan bahwa mediasi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutup. Pada tahap pembukaan, mediator memperkenalkan diri kepada para pihak dan menjelaskan aturan-aturan dalam proses mediasi. Beberapa aturan yang disampaikan antara lain larangan untuk saling memotong pembicaraan serta larangan bersikap kasar atau emosional. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman, tertib, dan kondusif se lama proses mediasi berlangsung.

Lalu, di tahap selanjutnya adalah tahap inti, yaitu tahap di mana mediator mulai menggali pokok permasalahan dari masing-masing pihak. Pada tahap ini, mediator berusaha untuk menemukan akar konflik serta menawarkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan kondisi di mana satu pihak ingin mempertahankan rumah tangga, namun pihak lain justru telah mantap untuk berpisah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mediator dalam menengahi dan mencari jalan tengah atau win-win solution yang adil dan rasional bagi kedua pihak.

Dan di tahap terakhir Ibu Syafa'atin S.H selaku Mediator NonHakim di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A. beliau mengatakan:

Tahap terakhir adalah tahap penutup, yaitu penyampaian kesimpulan dari proses mediasi. Jika tercapai kesepakatan, maka akan dibuatkan berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak dan mediator. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka proses akan dilanjutkan ke tahap persidangan oleh majelis hakim.

Mengenai prosedur hukum, beliau menjelaskan bahwa mediasi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak dapat diwakilkan kecuali dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus tersebut harus secara eksplisit menyebutkan bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk menjalankan mediasi. Pengecualian ini biasanya berlaku bagi pihak yang berada di luar kota atau luar negeri dan tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung. Jika salah satu pihak tidak dapat hadir, maka mediasi dapat dijadwal ulang berdasarkan kesepakatan mediator dan para pihak, yang biasanya menyesuaikan dengan jadwal sidang berikutnya.

Ibu Syafa'atin juga menyampaikan bahwa terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi, terutama dari sikap para pihak. Banyak dari mereka yang belum memahami tujuan mediasi dan datang dengan emosi tinggi. Bahkan, pernah terjadi kasus di mana salah satu pihak menangis, tidak terima dengan keputusan pasangannya, dan sampai pingsan karena tidak siap menghadapi perceraian. Dalam kasus seperti ini, mediator dituntut untuk memiliki kesabaran

dan kemampuan komunikasi yang tinggi agar proses tetap dapat berjalan secara efektif.

2. Efektivitas Proses Mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Bangil

Terkait indikator keberhasilan mediasi, beliau menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori hasil mediasi, yaitu tidak berhasil, sebagian berhasil, dan berhasil penuh atau damai, yakni:

Tingkat keberhasilan penuh atau damai sangat rendah, hanya berkisar 5% sampai 10%. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas pihak yang berperkara di pengadilan agama telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai sebelum sampai ke tahap mediasi. Meskipun demikian, keberhasilan sebagian tetap dianggap sangat berkontribusi dalam penyelesaian perkara, terutama dalam hal pembagian hak asuh anak, nafkah, maupun harta bersama.

Meskipun mediasi diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa sebagian besar pihak justru memberikan respons positif setelah menjalani proses mediasi. Tidak jarang, setelah sesi mediasi selesai, pihak-pihak yang dimediasi masih tetap berbicara dan berkonsultasi secara informal dengan mediator. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur hukum, tetapi juga memiliki peran psikologis dalam membantu para pihak meredakan emosi dan memahami situasi secara lebih rasional.

Dalam menghadapi pihak yang emosional, mediator dituntut untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh situasi. Mediator harus mampu mengingatkan bahwa ruang mediasi bukanlah tempat untuk saling menyalahkan, melainkan tempat untuk mencari solusi. Oleh karena itu, mediator dituntut untuk memiliki empati, komunikasi yang baik, serta sikap netral dan profesional selama proses berlangsung.

Peran kompetensi mediator sangatlah penting untuk memberikan dampak yang bisa memberi jalan keluar bagi para pihak.

Terkait dengan latar belakang pendidikan, Ibu Syafa'atin menyampaikan bahwa dirinya memperoleh sertifikasi mediator melalui pelatihan intensif selama dua minggu yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo Semarang bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Peserta pelatihan berasal dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya dari bidang hukum, tetapi juga dari manajemen dan lainnya. Pelatihan tersebut dilakukan secara intensif dari pagi hingga sore selama dua minggu penuh.

Kesimpulannya, beliau menyampaikan bahwa laporan hasil mediasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan ke Mahkamah Agung setiap bulan. Berdasarkan pengamatannya, jumlah perkara yang masuk ke tahap mediasi cenderung menurun,

namun tingkat keberhasilan mediasi justru mengalami peningkatan, terutama dalam hal keberhasilan sebagian. Peningkatan ini didukung oleh adanya perhatian dan dukungan dari pimpinan pengadilan serta program-program nasional yang menekankan supaya mediasi dalam Pengadilan Agama lebih efektif.

Pembahasan

1. Proses Mediasi Dalam Menyeleseikan perkara Perceraian Di Pengadilan agama Bangil Kelas

Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan wawancara dengan dua mediator bersertifikat, proses mediasi terdiri dari tiga tahapan utama yang dijalankan secara sistematis, yaitu tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutupan.

Tahap pembukaan merupakan awal proses di mana mediator memperkenalkan diri kepada para pihak yang bersengketa, serta menyampaikan aturan main yang berlaku di ruang mediasi. Aturan tersebut mencakup larangan memotong pembicaraan, tidak menggunakan kata-kata kasar, dan pentingnya menciptakan suasana saling menghormati. Tujuan dari tahap ini adalah membangun suasana yang kondusif agar komunikasi dapat berlangsung efektif (Khotamin et al., 2024).

Tahap inti merupakan inti dari keseluruhan proses mediasi. Pada tahap ini, mediator mulai menggali permasalahan yang dihadapi masing-masing pihak secara bergiliran. Mediator juga menganalisis kemungkinan titik temu yang dapat menjadi dasar kesepakatan. Dalam proses ini, diperlukan kepekaan terhadap kondisi psikologis dan emosional para pihak yang kerap kali masih dalam kondisi tidak stabil.

Tahap penutupan dilakukan setelah mediator menyampaikan ringkasan hasil dari perundingan. Jika tercapai kesepakatan, maka mediator menyusun berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak dan dilaporkan kepada majelis hakim. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke proses persidangan(Marpaung & Mukhsin, 2024).

Selain ketiga tahapan tersebut, proses mediasi juga dipengaruhi oleh kesiapan awal para pihak dalam menghadapi forum mediasi. Berdasarkan penuturan Ibu Sevy Dian dan Ibu Syafa'atin, keberhasilan awal sering kali ditentukan oleh sikap keterbukaan dan kemauan mendengar dari masing-masing pihak. Banyak pasangan yang datang ke ruang mediasi dengan penuh emosi, baik karena faktor perselingkuhan, ketidakharmonisan yang berlangsung lama, maupun tekanan keluarga. Dalam kondisi tersebut, mediator dituntut untuk memiliki kepekaan sosial

serta kemampuan menangkap bahasa tubuh dan ekspresi non-verbal sebagai bagian dari dinamika komunikasi (Setiawan, 2020).

Lebih lanjut, proses mediasi di Pengadilan Agama Bangil tidak sekadar prosedural, melainkan memuat nilai-nilai kemanusiaan dan empati. Dalam praktiknya, seringkali sesi mediasi berlanjut menjadi ruang curhat atau ruang refleksi emosional, di mana para pihak menyampaikan perasaan terdalam mereka yang tidak sempat diungkapkan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi di sini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hukum formal, tetapi juga sebagai wahana restoratif yang memungkinkan penyembuhan psikologis, meskipun tidak selalu berujung pada perdamaian formal Rahmadani G, (2025).

Di sisi lain, penggunaan teknologi seperti panggilan video (video call) mulai diimplementasikan untuk menjangkau pihak-pihak yang berada di luar daerah. Ibu Syafa'atin menjelaskan bahwa mediasi daring tetap dianggap sah apabila didukung oleh surat kuasa khusus dan persetujuan dari majelis hakim. Meskipun terdapat keterbatasan dalam membangun kedekatan emosional melalui layar, pendekatan ini dinilai cukup efektif untuk memastikan keterlibatan langsung para pihak dalam proses mediasi, sehingga asas keadilan dan partisipasi tetap terjaga.

2. Efektivitas Proses Mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Bangil

Efektivitas mediasi tidak hanya dilihat dari jumlah pasangan yang rujuk, tetapi juga dari hasil kesepakatan parsial seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta. Berdasarkan data, tren mediasi di Pengadilan Agama Bangil menunjukkan peningkatan efektivitas. Pada 2023, dari 287 perkara yang masuk, hanya 71 berhasil dimediasi (24,74%). Jumlah ini meningkat pada 2024 menjadi 98 dari 258 perkara (38,58%), dan hingga pertengahan 2025 mencapai 11 dari 26 perkara (42,31%). Meningkatnya efektivitas ini didorong oleh meningkatnya profesionalisme mediator, kesadaran hukum masyarakat, serta fasilitas dan dukungan kebijakan dari pengadilan. Kendati demikian, persentase keberhasilan mediasi masih di bawah 50%, menunjukkan perlunya peningkatan lebih lanjut. Penguatan pendekatan humanis, komunikasi empatik, serta edukasi hukum kepada masyarakat sangat penting agar mediasi tidak hanya menjadi kewajiban prosedural, tetapi menjadi sarana penyelesaian yang benar-benar efektif dan menyentuh aspek emosional serta keadilan para pihak.

Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya diukur dari tingkat keberhasilan dalam mencapai rujuk, tetapi juga sejauh mana proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan sebagian, seperti dalam hal hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Indikator lain adalah lamanya waktu penyelesaian perkara dan tingkat kepuasan para pihak.

Data dari Pengadilan Agama Bangil menunjukkan peningkatan presentase keberhasilan mediasi sebagian dan total dari tahun ke tahun, meskipun jumlah perkara yang berhasil mencapai rujuk kembali masih rendah.

Berikut ini adalah data keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bangil:

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi jumlah perkara gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A selama rentang waktu tahun 2023 hingga pertengahan 2025. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 287 perkara gugatan yang masuk. Jumlah ini menurun menjadi 258 perkara pada tahun 2024, dan hingga pertengahan tahun 2025, baru tercatat sebanyak 41 perkara. Penurunan jumlah perkara ini dapat disebabkan oleh

No	Tahun	Jumlah perkara gugatan masuk	Jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi	Jumlah Perkara Berhasil dimediasi	Presentase Jumlah Berhasil Mediasi
1	2023	287	216	7	24,74%
2	2024	258	176	9	38,58%
3	2025	41	15	1	42,31%

berbagai faktor, seperti kesadaran masyarakat yang mulai meningkat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui jalur non-litigasi, perubahan kebijakan internal pengadilan, atau dinamika sosial di lingkungan masyarakat yang lebih mendorong penyelesaian kekeluargaan.

Di sisi lain, tingkat keberhasilan mediasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, dari 287 perkara yang masuk, hanya 71 perkara yang berhasil dimediasi, dengan persentase keberhasilan sebesar 24,74%. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2024, di mana dari 258 perkara, sebanyak 98 perkara berhasil dimediasi, atau setara dengan 38,58%. Tren ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2025, dengan tingkat keberhasilan mencapai 42,31% dari 41 perkara yang masuk. Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam sistem dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangil.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan efektivitas tersebut antara lain adalah meningkatnya profesionalisme dan kompetensi para mediator, yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus dan sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran hukum dari para pihak yang

bersengketa turut menjadi faktor penting. Banyak pasangan yang mulai memahami bahwa mediasi bukanlah upaya untuk memaksakan rujuk, melainkan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik secara damai dan terstruktur, terutama terkait aspek-aspek penting seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah pasca-cerai. Di samping itu, dukungan institusional dari Pengadilan Agama Bangil juga turut berperan dalam meningkatkan efektivitas mediasi. Adanya fasilitas ruang mediasi yang representatif, kebijakan dari pimpinan pengadilan yang mendorong mediasi sebagai alternatif utama penyelesaian sengketa, serta pencatatan dan pelaporan hasil mediasi secara berkala ke Mahkamah Agung menunjukkan bahwa aspek manajerial turut berkontribusi terhadap keberhasilan.

Namun demikian, meskipun tren keberhasilan mediasi menunjukkan arah yang positif, angka keberhasilan tersebut masih berada di bawah 50% dari total perkara yang dimediasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa masih perlu ditingkatkan. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis, komunikasi yang lebih empatik, serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat agar mediasi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban procedural.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas tentang Efektivitas Proses Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A) dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Proses Mediasi Pengadilan Agama Bangil

Proses mediasi dalam perkara perceraian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutupan. Tahapan ini dirancang untuk menciptakan ruang komunikasi yang aman, terbuka, dan konstruktif antara para pihak. Dalam pelaksanaannya, mediasi diwajibkan kepada pihak-pihak yang berperkara dan harus dihadiri langsung, kecuali dengan kuasa khusus dalam kondisi tertentu. Para mediator memiliki peran sentral dalam memfasilitasi dialog, menggali akar konflik, serta mencari solusi yang adil dan berimbang. Tantangan terbesar dalam mediasi adalah kondisi psikologis para pihak yang belum stabil dan rendahnya pemahaman tentang tujuan mediasi.

2. Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian

Meskipun tingkat keberhasilan mediasi untuk mencapai rujuk hanya berkisar antara 5%–10%, proses ini dinilai cukup efektif dalam menghasilkan kesepakatan sebagian seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Mediasi juga berperan penting dalam mereduksi konflik, mempercepat proses persidangan, serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Di sisi lain, mediasi

memberikan ruang emosional dan psikologis bagi para pihak untuk menyalurkan perasaan, menyadari posisi masing-masing, dan menyelesaikan masalah secara lebih manusiawi dan adil. Oleh karena itu, meskipun tidak seluruhnya berhasil menghentikan perceraian, proses mediasi di Pengadilan Agama Bangil memiliki efektivitas yang nyata dalam mendorong penyelesaian yang damai, efisien, dan berkeadilan.

Daftar Rujukan

Ali, S., Ahmad, H., Padangsidimpuan, A., Islamnegeri, U., Ali, S., Ahmad, H., & Padangsidimpuan, A. (2024). *Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. *01*, 251–269.

Dewi. (2024). *Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau dari Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan*. 69–73.

Elvany, V. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan*. *1*(2), 1–18.

Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, *3*(1), 71–87. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56

Litti, N., Muhammadiyah Jakarta, U., Ray, Mh., & Rohmah, S. (n.d.). *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula Oneng Nurul Bariyah*. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index

Maghfiroh, M. (2023). Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen). *Skripsi*.

Muzamzil, A., & Hermawan, R. (2023). Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *6*(1), 972–981. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5910

Rahman, F. (2023). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manna. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *VIII*(I), 1–19.

Rani Damiati. (2025). *Efektivitas Mediasi dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang*. 1–23.

Rifki, A. (2021). *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan*.

Saragih, R., Ferba, M., Simanjuntak, E., Hukum, P. S., Sosial, F., Hukum, D., & Berastagi, U. Q. (2020). *Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar The*

Effectiveness of Mediation as an Alternative Dispute Resolution Againts Divorce Cases at The Pematangsiantar Religious Court. *3*(2), 734–742.

Suardi A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian pada Pengadilan Agama Makale Kabupaten Tana Toraja. *Αγαη*, *15*(1), 37–48.

Rayanih saragih, (2020). Efektivitas Mediasi Sebagai *Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar.*

Ubaidillah, D. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian di Luar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Juneto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19*. *2507*(February), 1–9.

Muzamzil, A., & Hermawan, R. (2023). Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *6*(1), 972–98

Rani Damiati. (2025). *Efektivitas Mediasi dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang*. 1–23.

I komang Gede Pasek Susila , (2021) *Efektitas mediasi Dalam Meyeleseikan Perkara percerai di Pengadilan Negri Amlapur*a .

Khalidah Azzahra, (2024*). Efektivitas Dalam Cerai Gugat Oleh wanita Karir di Pengadilan Agama Malang.*

Dika Anggi Purnomo, (2020). *Efektivitas Mediasi Sebagai Penyeleseian Konflik Dalam Perkara Perceraian di Luar Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susu Kabupaten Banjarnegara*

Nurlina Afifah Litti, (2021) *efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur.*

Susanto. (2023). *Efektivitas Organisasi dalam Lembaga Pemerintahan dan Hukum. Bandung: Remaja Rosda Karya*.

Anam. (2021). *Mediasi dalam Perspektif Hukum dan Implementasi di Pengadilan Agama*. *Surabaya: Sinar Grafika*